

**ANALISIS PENGEMBANGAN KAPASITAS DESA WISATA BURAI
KABUPATEN OGAN ILIR MENUJU PARIWISATA BERKELANJUTAN**

Mira Shintia

Magister Sosiologi Universitas Sriwijaya

Alamat e-mail : Miraashintiaa.27@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the development of Burai Village in Ogan Ilir Regency as a creative tourism village through the innovation of the Colorful Village. The study uses the capacity building framework of Grindle (1997) at the system, organization, and individual levels, with a descriptive qualitative method through literature studies, observations, and documentation. The results show that the development process takes place through six stages, namely community-based planning, the development of facilities and infrastructure, as well as the strengthening of local institutions such as Pokdarwis and BUMDes, supervision by the government and the community, digital promotion through social media, education and training of tourism managers, and strengthening regulations through Regent Decree Number 457 of 2021. These findings confirm that the success of Burai Village is not only supported by tourist attractions, but also by building the capacity of the community, organizations, and sustainable government policy support.

Keywords: Capacity Development, Tourism Village, Ecotourism, Burai

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengembangan Desa Burai di Kabupaten Ogan Ilir sebagai desa wisata kreatif melalui inovasi Kampung Warna-Warni. Kajian menggunakan kerangka capacity building Grindle (1997) pada level sistem, organisasi, dan individu, dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa proses pengembangan berlangsung melalui enam tahapan, yaitu perencanaan berbasis komunitas, pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan lokal seperti Pokdarwis dan BUMDes, pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat, promosi digital melalui media sosial, pendidikan dan pelatihan pengelola wisata, serta penguatan regulasi melalui SK Bupati Nomor 457 Tahun 2021. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Desa Burai tidak hanya ditopang oleh daya tarik wisata, tetapi juga oleh peningkatan kapasitas masyarakat, organisasi, dan dukungan kebijakan pemerintah yang saling berkesinambungan.

Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Desa Wisata, Ekowisata, Burai.

A. Pendahuluan

Pembangunan desa wisata di Indonesia semakin menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional. Desa wisata tidak hanya dipandang sebagai alternatif destinasi liburan, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kehadirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan peningkatan pendapatan asli desa. Selain itu, desa wisata juga berperan menjaga kelestarian tradisi serta budaya yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus memperkuat identitas lokal di tengah arus globalisasi. Dalam konteks lingkungan, desa wisata berbasis ekowisata berkontribusi menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan wisata yang ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat. Menurut Nuryanti (1993), desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik khusus baik berupa alam, budaya, maupun hasil kerajinan, yang dikelola dan dikembangkan sebagai destinasi

wisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Definisi ini menegaskan bahwa desa wisata bukan hanya tempat, melainkan juga sistem sosial-ekonomi yang dibangun bersama oleh komunitas. Sementara itu, Suwanto (2004) menyebut desa wisata sebagai bentuk pariwisata yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa dengan menekankan pada keterlibatan aktif warga. Lebih lanjut, Yoeti (2008) mendefinisikan desa wisata sebagai destinasi berbasis masyarakat yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. desa wisata tidak hanya sebatas menghadirkan atraksi, melainkan juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola potensi lokal menjadi syarat utama agar desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas (capacity building) menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kelembagaan yang

kuat dalam mengelola wisata secara mandiri dan profesional.

Salah satu contoh nyata adalah Desa Burai di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang berhasil bertransformasi menjadi destinasi wisata kreatif dengan menghadirkan inovasi Kampung Warna-Warni, di mana rumah-rumah penduduk dicat dengan warna cerah sehingga menciptakan daya tarik visual yang unik. Inovasi ini mampu menarik minat wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk datang berkunjung. Tidak hanya itu, Burai juga menawarkan wisata susur sungai di tepian Sungai Kelakar, kerajinan songket yang telah lama menjadi identitas budaya, serta kuliner khas seperti kemplang atau kerupuk ikan. Potensi ini menunjukkan bagaimana kreativitas warga dapat dioptimalkan menjadi produk wisata bernilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas lokal. Lebih jauh, pengembangan pariwisata Desa Burai telah mendorong peningkatan kapasitas masyarakat secara bertahap. Kehadiran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi contoh bagaimana organisasi lokal

memainkan peran penting dalam mengelola wisata. Pokdarwis terlibat dalam menata atraksi wisata dan mendampingi warga dalam mengembangkan usaha berbasis wisata, sementara BUMDes berperan dalam mengelola unit usaha seperti homestay, kuliner, dan paket wisata. Selain itu, masyarakat juga mulai menunjukkan peningkatan kapasitas dalam hal keterampilan pelayanan wisata, pengelolaan media sosial untuk promosi, hingga keterlibatan pemuda dalam mengembangkan ide-ide kreatif. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa penguatan kapasitas desa wisata tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Artikel ini berupaya untuk menganalisis pengembangan kapasitas pariwisata Desa Burai dengan menggunakan kerangka *capacity building* menurut Grindle (1997), yang menekankan pada tiga level penting, yaitu sistem, organisasi, dan individu. Melalui kerangka ini, dapat dilihat bagaimana peningkatan kapasitas telah berjalan dan bagaimana strategi yang tepat dapat memperkuat keberhasilan yang sudah dicapai. Dengan demikian,

pembahasan tidak hanya menyoroti capaian Desa Burai dalam transformasinya sebagai desa wisata kreatif, tetapi juga menekankan pentingnya konsistensi penguatan kapasitas agar desa ini mampu berkembang sebagai destinasi wisata yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam proses pengembangan kapasitas Desa Burai sebagai desa wisata. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi literatur, yang mencakup penelusuran buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan publikasi terkait pengembangan desa wisata serta teori capacity building Grindle (1997). Kedua, observasi, yaitu pengamatan langsung di Desa Burai untuk melihat kondisi sarana dan prasarana wisata, aktivitas kelembagaan lokal, serta dinamika partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan wisata. Ketiga, dokumentasi, yang meliputi pengumpulan foto, arsip desa, laporan program, dan dokumen regulasi seperti SK Bupati terkait penetapan Desa Ekowisata Burai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi tahapan pengembangan kapasitas desa sesuai konteks sosial dan kelembagaan yang berlangsung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tahapan Proses Pengembangan Kapasitas

1. Tahap Perencanaan (Planning Stage)

Tahap perencanaan di Desa Burai menjadi titik awal transformasi desa dari kawasan biasa menjadi destinasi wisata kreatif. Masyarakat bersama pemerintah desa berhasil mengidentifikasi potensi unik berupa rumah-rumah warga yang dicat warna-warni, Sungai Kelakar yang berpotensi untuk wisata air, kerajinan songket khas Burai, dan kuliner tradisional seperti kemplang ikan. Potensi tersebut kemudian diformulasikan dalam Program BU EKO (Burai Ekowisata) yang dijadikan pedoman pengembangan desa

wisata. Dari sudut *capacity building*, tahap ini memperlihatkan penguatan pada level sistem karena sudah ada intervensi kebijakan berupa SK Bupati Nomor 457 Tahun 2021 yang menetapkan Burai sebagai desa ekowisata. Perencanaan juga diintegrasikan ke dalam RPJMDes sehingga pariwisata diposisikan sebagai agenda pembangunan desa jangka menengah. Hal ini menandakan adanya komitmen pemerintah untuk mendukung Burai sebagai desa wisata unggulan. Secara analitis, tahapan perencanaan ini sudah sesuai dengan prinsip *community-based tourism* (CBT) karena melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Partisipasi ini penting agar program wisata tidak hanya didorong oleh pemerintah, tetapi juga oleh warga yang menjadi pelaku utama. Tantangan ke depan adalah bagaimana perencanaan ini diturunkan dalam bentuk regulasi internal seperti Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan desa wisata, SOP operasional Pokdarwis, dan rencana kerja tahunan yang jelas. Jika hal ini terwujud, maka arah pengembangan wisata Burai akan semakin terstruktur.

2. Tahap Pelaksanaan (Implementation Stage)

Pelaksanaan di Desa Burai ditandai dengan pembangunan sarana prasarana wisata, seperti gazebo, dermaga kecil untuk perahu wisata, spot foto, dan area parkir sederhana. Infrastruktur ini menjadi daya tarik tambahan sekaligus memberi kenyamanan bagi wisatawan. Selain itu, pelaksanaan juga mencakup pemberdayaan kelembagaan lokal, khususnya Pokdarwis sebagai pengelola wisata dan BUMDes yang diarahkan untuk mengembangkan unit usaha berbasis pariwisata seperti homestay, kuliner, dan penyewaan perahu. Dari perspektif *capacity building*, tahap ini menunjukkan penguatan pada level organisasi. Lembaga lokal diberi tanggung jawab untuk mengelola wisata, sehingga mereka belajar mengembangkan manajemen usaha, mengatur pembagian tugas, dan mengelola pemasukan. Implementasi ini juga membuka ruang belajar melalui praktik langsung (*learning by doing*), misalnya warga yang mulai membuka warung kuliner atau menyediakan homestay. Analisisnya, tahap pelaksanaan ini sudah menunjukkan keberhasilan nyata

karena mampu menggerakkan ekonomi lokal. Namun, agar lebih berkelanjutan, pelaksanaan perlu dilengkapi dengan standar pelayanan (misalnya standar homestay, standar tarif perahu wisata, standar kebersihan) sehingga kualitas wisata tetap terjaga. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem pencatatan keuangan yang transparan agar manfaat wisata dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.

3. Tahap Pengawasan (Monitoring and Control Stage)

Pengawasan pengelolaan desa wisata Burai dilakukan oleh berbagai pihak: BPD dan perangkat desa di tingkat lokal, serta DPRD dan Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir di tingkat kabupaten. Awalnya, pengawasan lebih berfokus pada penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan sarana wisata. Namun, seiring berkembangnya wisata Burai, pengawasan mulai meluas mencakup kualitas pelayanan, kelayakan fasilitas, dan dampak kegiatan wisata terhadap masyarakat. Dari *capacity building*, pengawasan ini memperkuat level sistem dan organisasi. Sistem formal (DPRD dan Inspektorat)

memberi legitimasi, sementara sistem sosial (tokoh adat, masyarakat) memperkuat kontrol partisipatif. Analisisnya, mekanisme pengawasan Burai cukup baik karena ada keseimbangan antara kontrol dari atas (*top-down*) dan partisipasi dari bawah (*bottom-up*). Namun, agar pengawasan lebih mendukung peningkatan kapasitas, fokusnya perlu diperluas. Tidak hanya menilai aspek keuangan dan infrastruktur, tetapi juga mengukur kepuasan wisatawan, tingkat keterlibatan masyarakat, dan dampak sosial budaya. Dengan demikian, pengawasan benar-benar menjadi alat untuk memperbaiki kualitas pengelolaan, bukan sekadar fungsi administratif.

4. Tahap Promosi dan Pemasaran (Promotion and Marketing Stage)

Promosi menjadi kunci keberhasilan Desa Burai dikenal luas. Masyarakat, khususnya generasi muda, memanfaatkan media sosial (Facebook, Instagram, YouTube) untuk memasarkan potensi wisata. Konten-konten visual seperti foto rumah warna-warni, aktivitas susur sungai, dan kerajinan songket berhasil menarik wisatawan dari berbagai daerah. Salah satu langkah kreatif

yang dilakukan masyarakat Desa Burai dalam mempromosikan potensi wisatanya adalah melalui pemanfaatan media sosial, khususnya Instagram. Desa Burai memiliki akun resmi dengan nama @ekowisata_burai yang saat ini telah memiliki lebih dari 5.000 pengikut. Akun ini berfungsi sebagai etalase digital desa wisata, di mana berbagai potensi lokal ditampilkan secara visual dan menarik. Konten yang dipublikasikan tidak hanya berupa foto-foto spot ikonik Kampung Warna-Warni, tetapi juga video singkat mengenai aktivitas susur Sungai Kelakar, proses pembuatan songket tradisional, hingga kuliner khas seperti kemplang ikan. Selain menampilkan atraksi wisata, akun ini juga aktif meliput berbagai kegiatan desa, mulai dari festival budaya, gotong royong warga dalam menjaga kebersihan, hingga kunjungan pejabat atau tamu penting. Dengan gaya penyajian yang sederhana namun autentik, promosi melalui Instagram ini berhasil meningkatkan daya tarik Desa Burai sekaligus memperkuat identitasnya sebagai destinasi ekowisata berbasis komunitas. Kehadiran akun ini juga menunjukkan meningkatnya kapasitas masyarakat, terutama

generasi muda, dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola dan memperluas jangkauan promosi desa wisata.

Dalam perspektif capacity building, tahap ini menguatkan level individu. Pemuda desa mendapatkan pengalaman langsung dalam digital marketing, fotografi, videografi, dan pelayanan wisata. Analisisnya, promosi digital yang dikelola langsung oleh masyarakat memberi nilai lebih karena narasi yang disampaikan lebih autentik dan berbasis pengalaman nyata. Namun, agar lebih profesional, promosi perlu dibuat lebih terencana, misalnya melalui kalender event tahunan, branding desa wisata, dan kerja sama dengan agen perjalanan. Strategi ini akan membuat promosi Burai lebih konsisten dan terukur.

5. Tahap Pendidikan dan Pelatihan (Education and Training Stage)

Peningkatan kapasitas individu menjadi bagian penting dari pengembangan wisata Burai. Berbagai pelatihan telah diberikan, antara lain pelatihan pemandu wisata, sosialisasi Sapta Pesona, manajemen homestay, promosi digital, dan pengolahan kuliner khas. Pelatihan ini

melibatkan Dinas Pariwisata, perguruan tinggi, dan komunitas lokal. Dari sudut pandang *capacity building*, tahap ini memperkuat level individu. Pelatihan memberi keterampilan teknis sekaligus membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan prima. Analisisnya, pelatihan di Burai efektif meningkatkan keterampilan dasar masyarakat, misalnya pemandu wisata yang kini lebih percaya diri menjelaskan sejarah dan budaya Burai kepada wisatawan. Namun, agar lebih berkelanjutan, pelatihan perlu dilakukan secara berulang, bersertifikat, dan menyasar kelompok yang lebih luas (perempuan, pemuda, kelompok rentan). Dengan demikian, peningkatan kapasitas tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang, tetapi menjadi bagian dari transformasi kolektif masyarakat desa.

6. Tahap Regulasi dan Penguatan Kelembagaan (Regulation Stage)

Tahapan ini menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan desa wisata. SK Bupati Nomor 457 Tahun 2021 yang menetapkan Desa Burai sebagai desa ekowisata memberi dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan. Selain

itu, desa juga mulai menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang desa wisata, aturan pembagian keuntungan usaha pariwisata, serta tata tertib penggunaan fasilitas umum. Dalam *capacity building*, regulasi memperkuat level sistem. Regulasi tidak hanya memberi legitimasi, tetapi juga mengatur mekanisme agar pengelolaan lebih adil dan transparan. Analisisnya, regulasi ini menjadi penopang keberlanjutan karena memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan wisatawan.

Tahapan pengembangan kapasitas Desa Burai memperlihatkan keterpaduan antara sistem, organisasi, dan individu.

1. Level sistem sudah diperkuat dengan adanya SK Bupati, pengawasan DPRD/Inspektorat, serta dukungan pemerintah daerah dalam promosi.
2. Level organisasi terlihat dari peran aktif Pokdarwis dan BUMDes dalam mengelola wisata dan mengembangkan unit usaha.
3. Level individu tampak dari meningkatnya keterampilan

masyarakat melalui pelatihan, keterlibatan pemuda dalam promosi digital, serta partisipasi warga dalam atraksi wisata.

Pengembangan kapasitas di Burai sudah menunjukkan arah yang benar: partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi regulasi, keberlanjutan pelatihan, serta profesionalisasi kelembagaan lokal. Jika ketiga hal ini terus diperkuat, Burai berpotensi menjadi ikon desa wisata berbasis komunitas dan ekowisata di Sumatera Selatan yang mandiri dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Pengembangan kapasitas Desa Wisata Burai menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi desa menjadi destinasi ekowisata tidak hanya bergantung pada kekuatan lokal, tetapi terutama pada kemampuan masyarakat, kelembagaan desa, dan sistem kebijakan untuk berkembang secara terintegrasi. Melalui penerapan kerangka capacity building Grindle (1997), terlihat bahwa penguatan

pada level sistem dilakukan melalui dukungan regulasi pemerintah dan integrasi pariwisata dalam dokumen perencanaan desa; penguatan level organisasi berjalan melalui peran aktif Pokdarwis dan BUMDes sebagai pengelola wisata; dan penguatan level individu tercermin dari peningkatan keterampilan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan praktik langsung dalam pengelolaan wisata. Setiap tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, promosi digital, pelatihan, hingga penguatan regulasi saling melengkapi dan membentuk proses pengembangan yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Desa Burai berhasil membangun model pengembangan desa wisata berbasis komunitas yang menunjukkan bahwa kolaborasi masyarakat dan pemerintah, ditopang kapasitas kelembagaan yang kuat, mampu menciptakan pariwisata yang inklusif, produktif, dan berorientasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

- Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi), 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Alwafi Ridho Subarkah, 2018. Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat), Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli – Desember 2018), Hlm 49-72
- Arida, I. N. S. (2017). *Ekowisata: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*. Cakra Press.
- Aulia, A. N., & Hakim, L. (2017). Pengembangan Potensi Ekowisata Sungai Pekalen Atas, Desa Ranu Gedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 5(3), 156. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.3.156-167>
- Baruah, P. (2020). Potential of urban wetlands for ecotourism development- a case of deepor beel, Guwahati. Nature Environment and Pollution Technology, 19(2), 611–625. <https://doi.org/10.46488/NEPT.2020.V19I02.016>
- Baskoro, M. S. P. (2016). Pengelolaan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat Desa Sukarara. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 5(2).
- Damayanti, E. (2014). Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3).
- Goreti, G., Kurniati, D., & Oktoriana, S. (2020) The Promotion Strategy in Batu Jato Ecotourism in Sekadau Regency. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 14(2), 288-301.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Harvard University Press.
- Habibi, A., Adi, W., & Syari, I.A. 2017. Kesesuaian Wisata Pantai untuk Rekreasi di Pulau Bangka. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 11(1): 54-59.
- Hadi, S. (2019). Capacity Building dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(1).
- Hakim, L. (2017). Managing Biodiversity For A Competitive Ecotourism Industry in Tropical Developing Countries: New Opportunities in Biological Fields. AIP Conference Proceedings (Vol. 1908, No. 1, p. 030008). AIP Publishing LLC
- Handayani, F., & Warsono, H., 2017. Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di

Kabupaten Rembang. Journal of Public Policy and Management Review, 6(3): 40-53.

Haryanto, J. T. (2014). Model Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY. Jurnal Kawistara, 4(3).

Rizki, 2018. Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Dengan Menggunakan Metode Analisis Swot: Studi Kasus Kawasan Pecinan Kapasan Surabaya, Jurnal Pariwisata Pesona, Volume 03 No 1, Juni 2018. Universitas Ciputra Surabaya